Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Nafkah Madiyyah Terhadap Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/Pa.Gsg

Cahyaning Violensy¹, Nurnazli², Rudi Santoso³, Rita Zaharah⁴, Ramlan⁵

^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu⁵

E-mail: cahyaningviolensy@gmail.com¹, nurnazlibukhari1971@gmail.com², rudisantoso@radenintan.ac.id³, ritazaharah221@gmail.com⁴, ramlan01bkl@gmail.com⁵

Abstrak: Salah satu kewajiban mendasar dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh seorang ayah atau suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang berada dalam tanggungannya. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah telah diatur secara tegas. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama masa pernikahan, tetapi juga mencakup nafkah Madiyyah, yaitu nafkah yang tidak diberikan selama masa pernikahan dan dapat dituntut melalui peradilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Islam dan hukum positif terhadap nafkah Madiyyah dalam Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg, serta mengevaluasi keadilan putusan hakim dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara nafkah Madiyyah, hakim berupaya mengharmonisasikan norma hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri selama pernikahan dan masa iddah. Dalam hukum positif, kewajiban tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d), serta diperkuat oleh Pasal 80 dan 81 mengenai kewajiban nafkah selama perkawinan. Hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan guna menghasilkan putusan yang adil dan proporsional. Kesimpulannya, hakim telah menjalankan fungsinya secara adil dengan mengintegrasikan asas syariat Islam dan aturan hukum positif dalam memutus perkara nafkah Madiyyah.

Kata kunci: Nafkah Madiyyah, Hukum Islam, Hukum Positif, Putusan Hakim, Kompilasi Hukum Islam

Abstract: One of the fundamental obligations within a household that must be fulfilled by a father or husband is providing financial support (nafkah) to his wife and children under his care. In both Islamic law and Indonesia's positive law, the provisions regarding maintenance have been explicitly regulated. This obligation not only applies during the course of marriage but also includes nafkah madiyyah, which refers to maintenance that was neglected or not fulfilled during the marriage and may be legally pursued through the Religious Court. This study aims to analyze the application of Islamic law and positive law regarding nafkah madiyyah in Decision Number 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg and to evaluate the fairness of the judge's verdict in that case. The method used in this research is normative legal research with a juridical-normative approach, employing literature review and documentation of statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings show that in ruling on nafkah madiyyah, the judge sought to harmonize the principles of Islamic law with those of positive law. Under Islamic law, a husband is obligated to provide maintenance for his wife during marriage and the iddah period. In positive law, this obligation is stipulated in the Compilation of Islamic Law Article 149 letter (d), and further supported by Articles 80 and 81, which address spousal maintenance during marriage. The judge considered the husband's financial capacity and the evidence presented in court to deliver a fair and proportional verdict. In conclusion, the judge exercised judicial discretion fairly by integrating Islamic legal principles with the provisions of positive law in resolving the nafkah madiyyah dispute.

Keywords: Nafkah Madiyyah, Islamic Law, Positive Law, Judicial Decision, Compilation of Islamic Law

Pendahuluan

Diantara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah atau seorang suami dalam bahtera rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya, dalam hukum Islam ketentuan mengenai nafkah sudah diatur dengan tegas dan tercantum di dalam al-qur'an¹ pada surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban memenuhi nafkah anak, Nafkah anak sangatlah penting bagi pertumbuhan anak. Tanpa nafkah, anak tersebut akan rentan fisik dan psikologisnya, tidak berkembang dengan baik dan tidak tumbuh layak seperti anak-anak pada umumnya, kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya-anaknya dikarenakan anak masih belum mampu untuk bekerja mencari nafkah sendiri, atau telah dewasa namun masih belum memiliki pekerjaan atau belum menikah, oleh karena itu, ayah (orang tua laki-laki) berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan keperluan dari anaknya tersebut dan juga harus sesuai dengan kemampuan dari ayahnya.²

Disamping itu juga nafkah yang tidak diberikan atau sengaja dilalaikan oleh ayahnya diperbolehkan untuk dituntut atau tidak, namun penulis berpendapat bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa segala biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya ayah wajib memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa atau sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu), mampu mengurus diri sendiri atau anak mampu kawin,³ sehingga dalam situasi seorang anak yang masih membutuhkan biaya penghidupan dari orang tuanya khususnya ayah maka ayah tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang terutang tersebut. Sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 105 huruf c menyatakan apabila terjadi perceraian antara orang tuanya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Apabila terjadi pelanggaran oleh satu pihak di mana pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya sehingga hak orang lain tidak terpenuhi, maka dengan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan agama. Pihak yang merasa dirugikan haknya dapat melaporkan gugatan hak kepada pengadilan,⁴ sehingga dalam hal ini pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan hukuman berupa membayar ganti rugi kepada pelaku atau memisahkan kedua pihak jika kedua pihak adalah pasangan suami istri, Karena seringkali dijumpai pasca perceraian ayah yang setelah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya berupa kewajibannya dalam memberikan nafkah pemeliharaan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf D Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; selanjutnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 D semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

¹ Rudi Santoso Mu'in, Fathul, "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," 2015, 6.

² Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah* 12, No. 1 (2020): 116-31.

³ "Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (HKI)*, Edisi Revi (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

⁴ Rudi Santoso dkk., "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara," *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center* 1, no. 1 (2023): 1-7, <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>.

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); selanjutnya Kompilasi Hukum Islam 80 ayat 4 huruf c Kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya pendidikan bagi anak, Bahkan pada pasal 77 ayat 5 salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama apabila tidak menunaikan kewajiban yang sudah di tentukan.

Sejatinya tidak ada celah dan ruang atau sebab apapun untuk menggugurkan dan mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 Bahwasanya orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam kajian hukum positif, selama ini jika terjadi kelalaian ataupun ketidakpatuhan suami dalam menjalankan kewajibannya didalam keluarga.⁵ yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak, maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (3). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.⁶

Berangkat dari beberapa ketentuan tersebut, dimana kewajiban pemenuhan nafkah menjadi kewajiban mutlak dan kumulatif oleh Ayah, tapi dalam hal ini kelalaian Ayah terhadap kewajibannya menjadi salah satu pemicu ketidakefektifan hukum di masyarakat, dengan ini bagi mereka ibu yang mengajukan gugatan nafkah madhiyah anak juga masih banyak yang mendapatkan kekecewaan karena penolakan dari majelis hakim yang menangani gugatan ibu tersebut. Padahal sejatinya hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban.⁷

Oleh sebab itu, artikel ini menganalisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Nafkah *Madiyyah* Terhadap Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/Pa.Gsg dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana keadilan hakim memutuskan perkara nafkah *Madiyyah* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif sehingga penelitian ini akan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah hukum keluarga islam.

Metodelogi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik melalui analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.⁸ Data diperoleh melalui studi dokumentasi berupa putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg, serta

⁵ Rudi Santoso Dkk., "The Role Of Village Apparatus In Determining Recipients Of The Family Hope Program (Pkh) According To Minister Of Social Affairs Regulation No . 1 / 2018 From The Perspective Of Siyasa Tanfidziyah Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Permensos No . 1 / 2018 Perspektif Siyasa Tanfidziyyah," No. 1 (2024): 145-61.

⁶ "PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", 1975.

⁷ Mochtar Kusuma Atmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* . (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1981).

⁸ Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000).

melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, makalah, dan literatur relevan lainnya.⁹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif deduktif, yakni memaparkan data dan konsep hukum secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan logika hukum Islam dan hukum positif. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis secara komprehensif terhadap permasalahan nafkah *Madiyyah*.

Konsep Nafkah *Madiyyah* dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami dan istri. Dari ikatan tersebut timbul hak dan kewajiban di antara keduanya. Kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk memahami perannya masing-masing, termasuk hak dan kewajiban yang harus dijalankan.¹⁰ Apabila kedua belah pihak melaksanakan tanggung jawabnya secara seimbang, maka akan tercipta ketenteraman dan ketenangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mewujudkan kebahagiaan hidup bersama.¹¹

Salah satu kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah. Kewajiban ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Meskipun konteks ayat tersebut berkaitan dengan masa menyusui, namun ayat ini juga menjadi dasar bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, terutama dalam kebutuhan pokok seperti makan dan pakaian.¹² Kewajiban ini timbul karena kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Legitimasi mengenai nafkah juga dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an lainnya, yang menjadi dasar hukum terhadap hak dan kewajiban yang muncul dari suatu ikatan pernikahan.¹³

Menurut mazhab Hanafi, nafkah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk makanan (pangan), pakaian (sandang), maupun tempat tinggal (papan). Mazhab Malikiyah memiliki pandangan serupa. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa standar pemberian

⁹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

¹¹ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003).

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1976).

¹³ Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1985).

nafkah kepada istri harus mempertimbangkan status sosial istri dan kemampuan ekonomi suami.¹⁴

Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut kadang tidak dilaksanakan oleh suami.¹⁵ Dalam kajian hukum Islam, apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya tanpa alasan yang sah, maka nafkah yang tidak diberikan tersebut dianggap sebagai utang. Nafkah inilah yang dikenal sebagai nafkah *Madiyyah*, yakni nafkah yang tertunggak selama ikatan pernikahan masih berlangsung. Dalam hal ini, istri berhak menuntut nafkah tersebut melalui peradilan agama.

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya selama tiga bulan atau lebih, istri berhak menuntut nafkah *Madiyyah* atau mengajukan gugatan atas nafkah yang terutang. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, jika istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, maka ia berpotensi meminjam uang atau menggunakan harta pribadinya untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁶ Oleh karena itu, suami wajib mengganti atau membayar nafkah tersebut sebagaimana ia berkewajiban membayar utang.

Pandangan bahwa nafkah *Madiyyah* merupakan utang yang wajib dibayar didukung oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Mereka menyatakan bahwa nafkah *Madiyyah* menjadi tanggungan suami yang wajib dilunasi sejak ia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dan kewajiban ini tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan oleh istri, sebagaimana halnya utang. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpandangan bahwa nafkah *Madiyyah* tidak otomatis menjadi utang, kecuali jika terdapat putusan pengadilan atau kesepakatan antara suami dan istri.¹⁷

Konsep Nafkah *Madiyyah* dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 30 yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁸

Merujuk kepada Undang-undang diatas, nafkah tidak disebutkan secara eksplisit sebagaimana dalam hukum Islam. Dalam perundangan Indonesia tidak ada sub khusus yang membahas masalah nafkah dalam kehidupan keluarga. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah.¹⁹

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: amzah, 2010).

¹⁵ Nuranzli, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan," *Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2015).

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

¹⁷ Abu Zahra, *Ahwal Asy-Syakhsiyah* (Bairut: Matba'ah Sa'adah, 1958).

¹⁸ Nasional Perpustakaan RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, cet,I* (Yogyakarta: New Marah Putih, 1974).

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Tazzafa, 2013).

Pengertian nafkah tersebut mengandung makna bahwa nafkah adalah suatu pemberian suami berupa uang kepada istri untuk dibelanjakan segala keperluan sehari-hari rumah tangga seperti makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Uang yang dijadikan sebagai standar nafkah adalah berasal dari pendapatan suami yang dihasilkan dari pekerjaan suami.²⁰

Selain itu, pengertian nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 80 ayat (4) Bagian Ketiga, Kewajiban Suami disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya Pendidikan bagi anak. Sebelumnya, pada ayat ke (2) disebutkan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pengertian nafkah menurut kompilasi hukum Islam lebih sempit maknanya. Kiswah (pakaian), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya Pendidikan bagi anak, merupakan ruang lingkup pengertian nafkah menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam kompilasi hukum Islam menyebut hal tersebut secara terpisah, sehingga mengenai pengertian nafkah sendiri tidak mengandung arti yang jelas, apakah yang dimaksud kiswah (pakaian), biaya perawatan, biaya pengobatan dan tempat kediaman bagi istri merupakan ruang lingkup pengertian nafkah sebagaimana dalam hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya.

Di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan, seperti nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

Kembali lagi dari ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri.²¹

Sedangkan didalam pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban atas nafkah, tempat tinggal,

²⁰ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

²¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet,1, 2001, 2001.*

dan biaya rumah tangga serta biaya perawatan atau pengobatan bagi istri dan anak. Hal ini menerangkan bahwa istri berhak untuk membebaskan kewajiban suaminya untuk tidak memberi nafkah kepadanya, namun apabila istri tidak memakai haknya tersebut maka suami tetaplah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Apabila suami terbukti sengaja untuk tidak mau membayarkan nafkah yang merupakan kewajibannya, sedangkan dirinya sudah mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau hakim telah menetapkan kadar nafkah wajib yang harus dibayarkan, sedangkan suami tersebut merupakan orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak untuk menjual harta milik suami yang dimilikinya secara paksa dan membayarkan hasil penjualan atas harta tersebut untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah yang terutang sesuai kebutuhan istrinya, akan tetapi, jika ternyata suami memang tidak mempunyai harta maka ia tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah, istri wajib menunggu sampai suaminya tersebut berkelapangan.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Seorang hakim perlu memperhatikan suatu ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam memutus suatu sengketa dengan rasa tegas dan bertanggung jawab.²² Oleh karena itu untuk menetapkan suatu putusan maka hakim memerlukan suatu dasar hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu putusan yang dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Berkaitan dengan Konsep Nafkah *Madiyyah* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Nafkah *Madiyyah* dalam Hukum Islam Nafkah *Madiyyah* mengacu pada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang dicerai selama masa iddah. Ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an yaitu, Surah Al-Baqarah (2:233): Perintah untuk memberikan mut'ah kepada perempuan yang dicerai. Dan Surah Ath-Thalaq (65:6-7): Mantan suami wajib menanggung nafkah dan tempat tinggal istri selama masa iddah, terutama jika istri dalam keadaan hamil.

Selain itu Hadis Rasulullah SAW, bahwa Fatimah binti Qais meriwayatkan bahwa wanita yang ditalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (HR. Muslim), kecuali jika sedang hamil. Sedangkan para imam mazhab seperti imam Syafi'i dan Hambali mengatakan Nafkah *Madiyyah* diberikan kepada istri yang ditalak raj'i tetapi tidak bagi talak ba'in kecuali jika hamil. Kemudian imam Hanafi dan Maliki Menegaskan pemberian nafkah iddah meskipun dalam talak ba'in dengan pertimbangan maslahat.

Nafkah *Madiyyah* dalam Hukum Positif Indonesia mengatur nafkah mahdiyah melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 (b) dan Pasal 156 (c) Dari peraturan ini, terlihat bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip hukum Islam dengan beberapa modifikasi untuk kepastian hukum.

Adanya putusan hakim menurut Moh Taufik Makarao adalah untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²³ Analisis Putusan Nomor

²² Sofyan Sauri, *Analisis Putusan Nomor 565/Pft.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

²³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

328/Pdt.G/2018/PA.Gsg Dalam putusan ini, Pengadilan Agama memutuskan bahwa mantan suami berkewajiban memberikan Nafkah *Madiyyah* kepada mantan istrinya. Beberapa pertimbangan hukum yang digunakan antara lain:

Dasar Hukum yang Digunakan:

1. Hakim mengacu pada KHI Pasal 149 dan 156 serta UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41.
2. Mempertimbangkan ajaran hukum Islam yang menegaskan kewajiban nafkah bagi istri yang masih dalam masa iddah.
3. Kondisi Ekonomi Mantan Suami.
4. Besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan finansial mantan suami agar tetap adil dan tidak memberatkan.
5. Kesejahteraan Mantan Istri, Hakim mempertimbangkan kebutuhan dasar mantan istri agar tetap bisa hidup layak setelah perceraian.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg sejalan dengan hukum positif dan sebagian prinsip hukum Islam dalam pemberian Nafkah *Madiyyah*. Dalam Islam, Nafkah *Madiyyah* diberikan bagi talak raj'i, sedangkan hukum positif Indonesia memperluas cakupan untuk perlindungan mantan istri. Keputusan pengadilan mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban mantan suami dan kebutuhan mantan istri, menunjukkan adaptasi hukum Islam dalam konteks hukum positif Indonesia.

Putusan ini juga menjadi preseden bagi kasus serupa di masa mendatang, sehingga suami tidak dapat mengabaikan kewajiban nafkah *Madiyyah* dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg telah mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif. Putusan ini mengakomodasi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, putusan ini tetap menjadi langkah maju dalam perlindungan hukum bagi perempuan.

Kesimpulan

Dalam memutuskan perkara nafkah *Madiyyah*, hakim di Indonesia menggunakan pendekatan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif secara harmonis. Berdasarkan hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, terutama jika perceraian tersebut berupa talak raj'i. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6 dan diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama fikih. Adapun pada kasus talak ba'in, umumnya hanya tempat tinggal yang tetap wajib diberikan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ketentuan tentang nafkah selama masa iddah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d), yang menegaskan kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, mut'ah, dan tempat tinggal kepada bekas istri selama masa iddah. Hakim dalam memutus perkara ini memperhatikan jenis perceraian (talak raj'i atau ba'in), kemampuan ekonomi suami, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan merujuk pada norma hukum Islam dan ketentuan dalam KHI serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menetapkan putusan yang adil dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan dan kemampuan para pihak. Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara nafkah *Madiyyah* mencerminkan upaya integrasi antara nilai-nilai

syariat Islam dan hukum positif nasional untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian.

Referensi

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Atmaja, Mochtar Kusuma. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalla Indonesia, 1981.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (Hki)*. Edisi Revi. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Burhan Asofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Ghazali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an" 4, No. 1 (2016): 1-23.
- Islam, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama. *Ilmu Fiqh Jilid Ii*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Kautun, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2010.
- Makaraao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso. "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," 2015, 6.
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, Dan Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, No. 1 (2020): 116-31.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Tazzafa, 2013.

- Nuranzli. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima'iyya* 8, No. 2 (2015).
- Nurnazli. "Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, No. 2 (2013): 2.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pp. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", 1975.
- Ri, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet,1, 2001*, 2001.
- Ri, Nasional Perpustakaan. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Cet,I*. Yogyakarta: New Marah Putih, 1974.
- Santoso, Rudi, Ance Kornia, Ghandi Liyorba Indra, Dan Rita Zaharah. "The Role Of Village Apparatus In Determining Recipients Of The Family Hope Program (Pkh) According To Minister Of Social Affairs Regulation No . 1 / 2018 From The Perspective Of Siyasa Tanfidziyah Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Permensos No . 1 / 2018 Perspektif Siyasa Tanfidziyyah," No. 1 (2024): 145-61.
- Santoso, Rudi, Rita Zaharah, Saiyah Umma Taqwa, Ita Dwilestari, Dan Uswatun Hasanah. "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara." *Ijrc: Indonesian Journal Of Religion Center* 1, No. 1 (2023): 1-7. <https://doi.org/10.61214/Ijrc.V1i1.7>.
- Sauri, Sofyan. *Analisis Putusan Nomor 565/Pft.G/2020/Pa.Ju Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2004.
- W.J.S.Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Zahra, Abu. *Ahwal Asy-Syakhsiyah*. Bairut: Matba'ah Sa'adah, 1958.